

## BAB V

### SIMPULAN, IMPLIKASI DAN REKOMENDASI

Dalam bab ini akan dikemukakan penafsiran dan pemaknaan peneliti terhadap hasil penelitian, yang disajikan dalam bentuk kesimpulan penelitian, implikasi dan rekomendasi. Kesimpulan, implikasi dan rekomendasi yang dikemukakan oleh peneliti sebagai hasil dari pembahasan data yang telah dilakukan. Adapun kesimpulan, implikasi dan rekomendasi dari temuan penelitian dan pembahasan yang telah penulis paparkan sebelumnya adalah sebagai berikut:

#### 5.1 Simpulan

Berdasarkan hasil temuan dan analisis data sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini yang berjudul “Analisis Permasalahan Kenaikan Jabatan Fungsional Guru SMAN/SMKN di Lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat” diperoleh kesimpulan bahwa Manajemen sumber daya manusia di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat berpedoman pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Manajemen sumber daya manusia Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dikelola oleh Subbagian Kepegawaian dan Umum.

Salah satu manajemen sumber daya manusia yang dikelola oleh Subbagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat adalah Kenaikan Jabatan Fungsional Guru SMAN dan SMKN yang ada di Provinsi Jawa Barat. Kenaikan jabatan fungsional Guru ini dikelola oleh tim pengelola kenaikan jabatan fungsional yang ada di Subbagian Kepegawaian dan Umum. Untuk proses pengelolaan kenaikan jabatan fungsional Guru ini Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat khususnya Subbagian Kepegawaian dan Umum berlandaskan kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Jabatan Fungsional Guru Dan Angka Kreditnya. Namun, pedoman secara teknis pelaksanaannya ada pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya.

Dalam Kedua peraturan tersebut dijelaskan berbagai hal yang menyangkut kenaikan jabatan fungsional dan angka kreditnya. Jika dilihat dari hasil temuan penelitian, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat memang sudah menacu kepada kedua peraturan tersebut dalam proses pelaksanaannya.

Namun dalam proses pelaksanaan kenaikan jabatan fungsional Guru SMAN dan SMKN yang ada di Provinsi Jawa Barat ini tidak terlepas dari berbagai permasalahan atau hambatan yang terjadi, permasalahan tersebut diantaranya yaitu: 1) Dengan adanya alih kelola jenjang SMA dan SMK dari Kabupaten atau Kota beralih ke provinsi permasalahannya ada pada jumlah sumber daya manusia yang masih belum sesuai dengan beban kerja; 2) Keterbatasan informasi atau wawasan dari sekolah yang bersangkutan mengenai apa-apa saja berkas yang harus disediakan ketika pemrosesan usulan angka kredit, keterbatasan wawasan tersebut dalam hal membuat publikasi ilmiah, seperti PTK, Karya tulis ilmiah, modul pembelajaran, dalam pembuatannya masih banyak yang belum sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh pihak penilai(kementerian). 3) Keterbatasan pemahaman tentang regulasi atau dasar hukum kenaikan jabatan fungsional dan penilaian angka kreditnya; 4) Guru dan dinas dari kab/kota belum memahami bahwa salah satu syarat untuk mendapatkan jabatan guru pertama yaitu harus memiliki sertifikat induksi, namun pada kenyataannya masih banyak guru yang masih belum memiliki sertifikat induksi; 5) Linearitasnya tidak sesuai atau posisi ijazah yang tidak linier dengan sertifikat pendidik/dengan mata pelajaran yang diajarkannya; 6) Terdapat guru yang memiliki ijazah S-1 nya bukan kependidikan tapi mempunyai sertifikat pendidik; 7) Untuk kenaikan jabatan fungsional Guru pertama tidak adanya diklat pemula mengenai administrasi kepegawaian termasuk yang membahas proses atau mekanisme kenaikan jabatan fungsionalnya sehingga menyebabkan banyaknya guru yang tidak memahami aturan mengenai kenaikan jabatan fungsional; 8) PTK tidak diseminarkan, sistematika tidak ada siklus, dan tidak dibuatkan jurnal (Guru kurang paham sistematikanya); 9) Pengelolaan berkas di Badan Kepegawaian Daerah yang lama, sehingga menyebabkan penerbitan SK kenaikan jabatan

**Suci Anisa, 2018**

*ANALISIS PERMASALAHAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU SMAN/SMKN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

fungsional yang telat dan banyak protes dari Guru yang bersangkutan; 10) Berkas Guru yang tidak lengkap, dan beralasan berkasnya tidak ada atau hilang.

Adapun Solusi yang diberikan oleh Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat dalam mengatasi permasalahan tersebut adalah: 1) Penambahan personil tim pengelola di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat khususnya pengelola kenaikan jabatan fungsional dan prosedur pemrosesannya berbasis aplikasi untuk mempermudah dan mempercepat pengelolaannya; 2) Mengadakan sosialisasi dan atau Bimbingan Teknis (Bimtek) terkait cara pembuatan dan penyusunan publikasi ilmiah; 3) Diadakan sosialisasi atau diklat untuk Guru mengenai administrasi kepegawaian khususnya dalam proses kenaikan jabatan fungsional dan penilaian angka kreditnya; 4) Untuk permasalahan terkait linearitas, Guru harus kuliah lagi atau harus mengikuti PPG; 5) Berkoordinasi dengan BKD terkait pengelolaan berkas kenaikan jabatan fungsional guru; 6) Terkait permasalahan berkas yang tidak lengkap, Dinas memberikan instruksi ke KCD, terkait persyaratan kenaikan jabatan fungsional dan kenaikan pangkatnya, dan tegas dalam memberikan batas waktu pengumpulan berkas tersebut.

## 5.2 Implikasi

Melalui temuan-temuan penelitian serta analisis hasil penelitian, terdapat beberapa permasalahan yang terjadi dalam proses kenaikan jabatan fungsional Guru. Diantaranya yaitu ketidakpahaman Guru terkait regulasi atau dasar hukum dalam proses kenaikan jabatan fungsionalnya, sehingga masih ada Guru yang tidak memenuhi salah satu syarat kenaikan jabatan tersebut, diantaranya yaitu Guru tidak membuat karya tulis ilmiah, dan jika membuat pun masih ada yang tidak sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan. Kemudian pengelolaan berkas kenaikan jabatan fungsional yang lama, sehingga sering terjadi keterlambatan penurunan SK Jabatan Fungsionalnya, maka jika SK kenaikan jabatannya belum keluar akan berpengaruh kepada kenaikan pangkatnya yang belum dapat diproses.

**Suci Anisa, 2018**

*ANALISIS PERMASALAHAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU  
SMAN/SMKN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

Dari beberapa permasalahan yang terjadi tersebut harus dibuatkan sebuah solusi penyelesaian masalahnya, salah satunya yaitu harus dilakukan sosialisasi terkait aturan kenaikan jabatan fungsional untuk Guru sehingga Guru memahami aturan dan alur pelaksanaannya. Selain itu perlu diadakan pelatihan atau bimbingan teknis terkait pembuatan karya tulis ilmiah. Jika hal ini tidak dilakukan, maka akan berdampak kepada proses pelaksanaan kenaikan jabatan fungsionalnya yang tidak akan berjalan dengan lancar dan tidak sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.

### 5.3 Rekomendasi

Berikut ini rekomendasi dari penelitian dengan harapan semoga bermanfaat bagi pihak lembaga Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat khususnya Subbagian Kepegawaian dan Umum, yaitu sebagai berikut:

1. Lembaga perlu mengadakan sebuah pelatihan atau bimbingan teknis terkait pembuatan karya tulis ilmiah bagi Guru.
2. Lembaga perlu melakukan sosialisasi terkait peraturan, alur dan prosedur kenaikan jabatan fungsional Guru agar Guru mengetahui dasar hukum dan proses kenaikan jabatan fungsionalnya. Dengan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Merencanakan proses sosialisasi terkait sasaran, tujuan, waktu dan tempat pelaksanaan.
  - b. Menginformasikan kepada yang bersangkutan terkait rencana kegiatan sosialisasi tersebut.
  - c. Menyelenggarakan kegiatan sosialisasi.
  - d. Evaluasi hasil sosialisasi.
3. Dengan adanya alih kelola terkait pelimpahan wewenang dari kabupaten/kota ke provinsi tentang pengelolaan SMAN dan SMKN Provinsi Jawa Barat, maka Lembaga perlu segera menyusun suatu kebijakan baru terkait proses pengelolaan kenaikan jabatan fungsional guru.
4. Lembaga perlu melakukan kembali analisis kebutuhan pegawai khususnya di Sub Bagian Kepegawaian dan Umum, agar jumlah pegawai sesuai dengan beban kerja

**Suci Anisa, 2018**

*ANALISIS PERMASALAHAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU SMAN/SMKN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT*  
Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu |  
perpustakaan.upi.edu

yang ada, sehingga pekerjaan dapat dikerjakan lebih efektif dan efisien dengan jumlah tenaga kerja yang mencukupi.

**Suci Anisa, 2018**

*ANALISIS PERMASALAHAN KENAIKAN JABATAN FUNGSIONAL GURU  
SMAN/ SMKN DI LINGKUNGAN DINAS PENDIDIKAN PROVINSI JAWA BARAT*  
Universitas Pendidikan Indonesia | [repository.upi.edu](https://repository.upi.edu) |  
[perpustakaan.upi.edu](https://perpustakaan.upi.edu)